

ABSTRAK

Collaborative Governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk Pelayanan Publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola Kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui efektivitas *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Utara; (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan teori proses kolaborasi dari Bogdan dan Taylor.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan kolaborasi dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah berjalan efektif, masih ada faktor yang belum terpenuhi yang dapat menghambat proses penanganan kekerasan seksual pada anak yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas atau sarana prasarana kegiatan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat serta masih enggan masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya menjadi penghambat dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Aceh Utara.

Kesimpulan penelitian ini Proses kolaborasi pemerintah dalam penanganan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Utara ialah proses kolaborasi pemerintah dalam penanganan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Utara Melalui Dialog tatap muka dimana pertemuan diadakan di kantor Aula Dinas Sosial yang dihadiri semua pihak baik dari pemerintah, fasilitator, BKM, KSM, dan masyarakat. Dialog tatap muka dilakukan pada awal pelaksanaan program PENANGGULANGAN, pada akhir tahun mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dimulai dari OPD hingga BKM serta Membangun kepercayaan pihak pemerintah pelaksana program Salah satu cara dengan melakukan transparansi kepada semua pihak yang terkait Penanggulangan serta pelibatan penuh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya dengan pihak yang terkait dengan program. Lalu, Pihak pemerintah pelaksana program melakukan komitmen terhadap proses kolaborasi program Penanggulangan, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan dan petunjuk dari yang sudah ditetapkan menjaga komitmen didalam kolaborasi program Penanggulangan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, dampak sementara yang dihasilkan terkait program ini terkhususnya di Kabupaten Aceh Utara bisa dikatakan belum maksimal berhasil, dikarenakan masih belum teratasinya penanganan kekerasan seksual pada Kabupaten Aceh Utara besar harapan masyarakat kepada tim Penanggulangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Kata Kunci: Colaborative, Governance, Kekerasan Seksual, Anak.

ABSTRACT

Collaborative Governance includes partnerships between government institutions for Public Services. A decision-making approach, Collaborative governance, a series of joint activities in which partners mutually produce goals and strategies and share responsibilities and resources.

The objectives of this study are: (1) to determine the effectiveness of collaborative governance in handling cases of sexual violence against children in North Aceh Regency; (2) to determine what factors influence the effectiveness of collaborative governance in handling cases of sexual violence against children in North Aceh Regency. This study uses the theory of the collaborative process from Bogdan and Taylor.

This type of research uses a qualitative method with a descriptive approach. Descriptive research is research conducted to determine the value of one or more variables, making comparisons and connecting with other variables.

The results of this study indicate that collaboration in handling cases of sexual violence against children in North Aceh Regency has not been fully effective. Although it has been running effectively, there are still factors that have not been met that can hinder the process of handling sexual violence against children, namely the availability of human resources and facilities or infrastructure for activities. In addition, the lack of public knowledge and the reluctance of the public to report the violence they experience are obstacles in disclosing cases of sexual violence against children in North Aceh Regency.

The conclusion of this study The process of government collaboration in handling the Prevention of Sexual Violence Against Children in North Aceh Regency is the process of government collaboration in handling the Prevention of Sexual Violence Against Children in North Aceh Regency through face-to-face dialogue where the meeting was held at the Social Service Hall office which was attended by all parties from the government, facilitators, BKM, KSM, and the community. Face-to-face dialogue was carried out at the beginning of the implementation of the OVERCOME program, at the end of the year a coordination meeting was held with all parties involved starting from OPD to BKM and Building trust in the government implementing the program One way is to be transparent to all parties related to the Prevention and full involvement of the community, so that the community can trust the parties related to the program. Then, the government implementing the program commits to the collaborative process of the Mitigation program, carrying out tasks and obligations in accordance with the rules and instructions that have been set, maintaining commitments in the collaboration of the Mitigation program to achieve the results that have been set, the temporary impacts produced related to this program, especially in North Aceh Regency, can be said to have not been maximally successful, because the handling of sexual violence in North Aceh Regency has not been resolved, the community has high hopes for the Mitigation team to be able to resolve this problem.

Keywords: *Collaborative, Governance, Sexual Violence, Children.*